

**DETERMINAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KABUPATEN KUDUS**

Indri Puspita Sari, R. Slamet Santoso, Retna Hanani

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstrak**

Indonesia menjadi negara yang darurat akan sampah terutama sampah plastik, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif. Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah tidak terlepas dari berbagai variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu diantaranya adalah variabel sumber daya dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran hubungan antara sumber daya dan lingkungan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan di Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif dengan jumlah responden sebesar 75 pegawai teknis Dinas PKPLH Kabupaten Kudus dan UPT TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus. Teknik analisis data statistik yang digunakan meliputi korelasi kendall tau, koefisien konkordansi kendall tau, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara sumber daya dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus sebesar 39%. Terdapat hubungan yang positif antara lingkungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus sebesar 10,8%. Sumber daya dan lingkungan secara bersama-sama memiliki korelasi sebesar 39,3% terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

Kata kunci : pengelolaan sampah, sumber daya, lingkungan

### ***Abstract***

*Indonesia is an emergency country for waste, especially plastic waste, therefore it is necessary for a comprehensive waste management to be carried out. The implementation of waste management is inseparable from various variables that can affect the achievement of successful policy implementation. One of them is resource and environment variables. This study aims to determine the magnitude of the relationship between resources and the environment on the implementation of management policies in Kudus Regency. The research method used is quantitative with the number of respondents being 75 technical employees of the PKPLH Office in Kudus Regency and UPT TPA Tanjungrejo Kudus Regency. Statistical data analysis techniques used include the Kendall tau correlation, the Kendall tau concordance coefficient, and the coefficient of determination. The results showed that there was a positive relationship between resources and the implementation of waste management policies in Kudus Regency by 39%. There is a positive relationship between the environment and the implementation of waste management policies in Kudus Regency by 10.8%. Resources and the environment together have a correlation of 39.3% on the implementation of waste management policies in Kudus Regency.*

*Keywords: waste management, resources, environment*

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan global sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif. Perlu adanya kerjasama dari berbagai stakeholder mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target dalam upaya penanganan sampah yakni sampah yang dikelola 100% , dengan pengurangan sampah sebesar 30% yang meliputi mencegah penumpukan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan sebesar 70% sisanya adalah target penanganan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Kebijakan tersebut dituangkan melalui

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga agar pengelolaan sampah nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dilakukan mulai dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir.

Salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah yang sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi yang melayani wilayah hinterland adalah Kabupaten Kudus. Sektor industri menjadi faktor penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus dan didominasi oleh industri rokok, konveksi, dan kertas. Limbah industri yang dihasilkan

oleh berbagai pabrik industri, baik berupa limbah cair maupun padat dapat merusak kelestarian lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Disamping sektor industri yang menjadi penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus, sektor perdagangan juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus tahun 2014, terdapat 53 pasar modern, 6 pasar daerah, 22 pasar desa, dan 2 pasar hewan. Jumlah tersebut adalah jumlah yang cukup besar apabila dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, atau rata-rata setiap kecamatan memiliki sekitar 3 sampai 4 buah pasar. Hal ini menyebabkan jumlah produksi sampah yang bersumber dari pasar mencapai angka 30.78% ([sipsn.menlhk.go.id/](https://sipsn.menlhk.go.id/)).

Banyaknya produksi sampah yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan penyebarannya. Kabupaten Kudus menempati posisi pertama wilayah padat penduduk berdasarkan wilayah perbatasan Kabupaten Kudus lainnya dengan kepadatan penduduk sebesar 1997,37 jiwa/km<sup>2</sup> tahun 2020. Kabupaten Kudus juga menempati posisi dua besar rasio timbunan sampah berdasarkan luas wilayah sebesar 0,189 ton/jiwa dan berdasarkan jumlah

penduduk sebesar 378,511 ton/km<sup>2</sup> menurut wilayah perbatasan Kabupaten Kudus tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 orang jiwa menghasilkan sampah sebesar 0,189 ton dan setiap 1 km<sup>2</sup> menghasilkan sampah sebesar 378,511 ton.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa Kabupaten Kudus menghasilkan timbunan sampah sebesar 160,924.12 ton pada tahun 2020. Tercatat pula bahwa jumlah timbunan sampah (ton/hari) di Kabupaten mengalami kenaikan sejak tahun 2017-2020.

Seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Kudus akan berakhir pada tempat pembuangan sampah akhir yakni TPA Tanjungrejo. TPA Tanjungrejo memiliki luas lahan sebesar 5,6 hektar dengan kondisi saat ini *overload*. Kegiatan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di TPA Tanjungrejo memiliki banyak kendala diantaranya keterbatasan anggaran, sarana, dan jumlah tenaga operasional yang ada (Wachid and Caesar, 2020). Struktur tanah di TPA Tanjungrejo yang termasuk tanah padas menyebabkan sampah-sampah yang menghasilkan air licit tidak secara keseluruhan mengalir ke kolam licit. IPAL yang digunakan untuk mengolah air licit agar tidak mencemari aliran sungai yang

mengalir ke sawah-sawah warga tidak berfungsi dengan baik (infodesanews.com). Kali Jaranan yang berada di Desa Prambatan Lor, Kaliwungu telah tercemar oleh limbah pabrik yang diduga berasal dari pabrik industri disekitar kawasan tersebut, baik pabrik rokok maupun pabrik tahu (Mustofa, 2019). Selain diakibatkan oleh limbah, pencemaran juga diakibatkan oleh banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan sehingga timbul lumut-lumut yang menggenangi hingga warna sungai mulai menghitam. Masih terdapat masyarakat yang secara sengaja membuang sampah tidak pada tempat yang seharusnya (Wachid and Caesar, 2020). Masyarakat juga masih belum melakukan pemilahan sampah dimana sampah masih tercampur menjadi satu salah satunya adalah warga Desa Bae (Prassojo C, Istirokhatun T, 2014). Kesadaran masyarakat yang rendah juga menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat. Tercatat 12 orang warga Kabupaten Kudus tertangkap basah membuang sampah sembarangan dengan sanksi denda sebesar Rp 200.000,00 dan kurungan selama satu bulan (Sasongko, 2019). Pengelolaan persampahan yang dilakukan Kabupaten Kudus menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun

2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kabupaten Kudus.

Implementasi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus memerlukan adanya sumber daya berupa sarana dan prasarana yang memadai sebagai salah satu penunjang keberhasilan pencapaian pengelolaan sampah yang baik.

Berdasarkan data Dinas PKPLH Kabupaten Kudus tercatat bahwa jumlah sarana dan prasarana yang tersedia mengalami penurunan sejak tahun 2018-2020 baik secara kuantitas maupun kualitas. Beberapa diantaranya adalah mobil tangki air yang mengalami penurunan secara kuantitas dari 5 unit menjadi 3 unit. Sedangkan becak motor sampah pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah 59 unit, namun hanya 38 unit yang berada dalam kondisi baik yang kemudian jumlahnya mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 40 unit dengan kondisi baik. Adapun becak sampah pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah 126 unit, namun hanya 104 unit yang berada dalam kondisi baik yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 86 unit dengan kondisi baik.

Penelitian ini ingin melihat determinan (faktor-faktor yang mempengaruhi) implementasi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kudus.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana hubungan sumberdaya dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana hubungan lingkungan dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana hubungan sumber daya dan lingkungan dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis hubungan sumberdaya dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menganalisis hubungan lingkungan dengan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menganalisis hubungan sumber daya dan lingkungan dengan implementasi pengelolaan sampah Kabupaten Kudus.

### **KAJIAN TEORI**

#### **Administrasi Publik**

*John M. Pfiffner* dan *Robert V. Presthus* dalam Inu Kencana Syafie (2006:23) mendefinisikan administrasi publik sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

George J. Gordon dalam Inu Kencana Syafie (2006:25) menyatakan bahwa Administrasi Publik adalah rangkaian proses yang dilakukan organisasi atau perseorangan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan pengadilan.

#### **Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye (1987:1) dalam Solichin Abdul Wahab (2015:14) mengartikan kebijakan publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do” (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

James E. Anderson (1970) dalam Sahya Anggara (2014) mendefinisikan kebijakan publik, “Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials” (kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan pemerintahan dan para pejabatnya).

## **Implementasi Kebijakan Publik**

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Solichin Abdul Wahab, 2012:135) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision” (tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan).

Dalam teori implementasi, proses implementasi memiliki model-model yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis suatu program kebijakan. Terdapat beberapa model dalam studi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli. Peneliti menggunakan gabungan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn dan George Edward III dengan pendekatan teori implementasi top down.

Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) dalam Tachjan (2006) menyatakan bahwa kinerja sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana

4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

George Edwards III (1980:1) dalam Tachjan (2006) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Communication (komunikasi)
2. Resources (sumber daya)
3. Dispositions (disposisi)
4. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatori. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 75 pegawai lapangan Dinas PKLH dan UPT TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara terstruktur dan kuisioner tertutup. Teknik analisis data yang digunakan yakni, korelasi kendall tau, koefisien konkordansi kendall, dan koefisien determinasi.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Variabel Implementasi (Y)**

Sebanyak 65,3% responden menyatakan bahwa implementasi pengelolaan sampah

baik, namun masih terdapat 12% responden yang menyatakan tidak baik. Hasil tabel analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa masih terdapat 41,3% responden yang menyatakan tingkat timbulan sampah di TPA Tanjungrejo cenderung mengalami kenaikan.

## **2. Variabel Sumber Daya (X1)**

Sebanyak 82,7% responden menyatakan bahwa sumber daya baik dan sebesar 5% menyatakan sumber daya tidak baik. Hasil tabel analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa masih terdapat 17,3% responden yang menyatakan armada pengangkut sampah kurang dan 2,7% responden menyatakan sangat kurang dengan keterangan bahwa terjadi pengurangan beberapa armada karena kondisi yang sudah tua (lama). Sedangkan pada indikator kondisi armada yang tersedia menunjukkan bahwa masih terdapat 18,7% responden yang menyatakan kondisi armada tidak baik dan 5,3% responden menyatakan kondisi armada tidak baik.

## **3. Variabel Lingkungan (X2)**

Sebanyak 84% responden menyatakan bahwa lingkungan baik, namun masih terdapat 10,7% responden yang menyatakan tidak baik. Hasil tabel analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa masih terdapat 56% responden menyatakan

masyarakat kurang peduli terhadap sampah disekitar, 58,7% responden menyatakan bahwa sikap masyarakat dalam memilah sampah tidak baik, 52% responden menyatakan baru sebagian masyarakat yang patuh terhadap adanya larangan penggunaan kantong plastik dalam berbelanja, dan 62,7% responden menyatakan kondisi lahan TPA tidak baik

## **PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Hubungan Sumber daya dengan Implementasi Pengelolaan Sampah**

Hasil analisis tabulasi silang menunjukkan bahwa apabila sumber daya dalam kondisi baik maka implementasi yang dihasilkan sebagian besar akan baik. Sebaliknya, apabila sumber daya dalam kondisi tidak baik maka implementasi yang dihasilkan sebagian besar juga akan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil implementasi dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki.

Pengujian variabel sumber daya terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat atau sedang dan signifikan. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji rank kendall yang memiliki nilai korelasi sebesar 0,586 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai korelasi 0,586 berada pada interval

0,40 - 0,599 yang memiliki arti cukup kuat atau sedang. Sedangkan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti signifikan, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara sumber daya dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sumber daya maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga akan semakin tinggi dan semakin rendah sumber daya maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga akan semakin rendah.

Berdasarkan penghitungan koefisien determinasi diperoleh angka Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,390 atau sama dengan 39%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya memiliki pengaruh sebesar 39% terhadap jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

## **2. Analisis Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Pengelolaan Sampah**

Hasil analisis tabulasi silang menunjukkan bahwa apabila lingkungan dalam kondisi baik maka implementasi yang dihasilkan sebagian besar akan baik. Sebaliknya, apabila lingkungan dalam kondisi tidak baik maka implementasi yang

dihasilkan sebagian besar juga akan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil implementasi dipengaruhi oleh lingkungan yang dimiliki.

Pengujian variabel lingkungan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat keamatan yang rendah dan signifikan. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji rank kendall yang memiliki nilai korelasi sebesar 0,223 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai korelasi 0,223 berada pada interval 0,20 - 0,399 yang memiliki arti rendah. Sedangkan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti signifikan, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara lingkungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini berarti bahwa semakin rendah lingkungan maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga akan semakin rendah dan semakin tinggi lingkungan maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga akan semakin tinggi.

Pada penghitungan koefisien determinasi diperoleh angka Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,108 atau sama dengan 10,8%. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki

kontribusi sebesar 10,8% terhadap jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

### **3. Analisis Hubungan Sumber Daya dan Lingkungan Terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah**

Pengujian dalam melihat besar kecilnya korelasi antara variabel sumber daya dan lingkungan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara bersama-sama dilakukan melalui uji konkordasi kendall's W. Berdasarkan hasil uji konkordasi kendall's W menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel independen (sumber daya dan lingkungan) terhadap variabel dependen (implementasi kebijakan pengelolaan sampah) sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi sebesar 0,974 yang berada pada interval 0,80 – 1,00 yang memiliki arti sangat kuat. Sedangkan tingkat signifikansi dari hubungan variabel independen (sumber daya dan lingkungan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (implementasi kebijakan pengelolaan sampah) dapat dilihat pada nilai Asymp. Sig. sebesar 0,000. Nilai Asymp. Sig.  $0,000 < 0,05$  menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang menyatakan bahwa variabel sumber daya dan lingkungan memiliki hubungan

yang positif dan signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus dinilai sudah baik. Hal ini diindikasikan dengan tabel hasil rekapitulasi statistik deskriptif implementasi kebijakan pengelolaan sampah (Y) yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden (65,3%) menyatakan baik, sehingga muncul angka rata-rata sebesar 3,11 dengan keterangan yaitu "baik".
2. Sumber daya yang tersedia guna menunjang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dalam kondisi yang baik. Hubungan antara sumber daya dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah memiliki tingkat keeratan yang sedang atau cukup kuat, yang dibuktikan dengan perolehan angka koefisien korelasi sebesar 0,586 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara sumber daya dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di

Kabupaten Kudus sehingga Hipotesis pertama atau  $H_{a1}$  diterima.

3. Lingkungan yang ada dalam menunjang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus memiliki kondisi yang baik. Hubungan antara lingkungan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah memiliki tingkat keeratan yang rendah, yang dibuktikan dengan perolehan angka koefisien korelasi sebesar 0,223 dengan nilai signifikan sebesar 0,01 kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang rendah antara lingkungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga Hipotesis kedua atau  $H_{a2}$  diterima.
4. Sumber daya dan lingkungan secara bersama-sama memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini diindikasikan dengan perolehan nilai korelasi sebesar 0,974 yang berada pada interval 0,80 – 1,00 yang memiliki arti sangat kuat. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya dan lingkungan secara bersama-sama memiliki hubungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus, sehingga Hipotesis ketiga atau  $H_{a3}$  diterima.

## **SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Pada variabel implementasi kebijakan pengelolaan sampah, perlu adanya upaya dan tindakan secara berkala dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA agar tingkat timbulan sampah dapat berkurang.
2. Pada variabel sumber daya, perlu adanya peningkatan terhadap ketersediaan dana dalam menunjang proses pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Perlu adanya perhatian yang lebih terhadap armada-armada yang telah berumur serta mengalami penurunan kapasitas penampungan. Antara hanya mengurangi tanpa mengganti atau tetap berusaha merawat yang sudah berumur. Hal ini bertujuan supaya pelayanan persampahan yang diberikan dapat dilakukan dengan lebih baik dan maksimal.
3. Lingkungan didalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dinilai sudah cukup baik. Akan tetapi, pada tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah masih rendah. Oleh karena itu,

perlu adanya peningkatan rasa kepedulian masyarakat yang lebih terhadap persoalan sampah yang dapat dimulai dari pemilahan secara mandiri dalam membantu terwujudnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Peningkatan rasa kepedulian dapat dilakukan melalui program-program inovatif yang kemudian di sosialisasikan secara berkala. Selain itu, dalam hal kebijakan larangan penggunaan kantong plastik dalam berbelanja, pemerintah harus melakukan tindakan yang berkelanjutan sebagai salah satu solusi terhadap penggantian penggunaan kantong plastik dalam berbelanja. Kemudian kondisi lahan TPA yang sudah dalam keadaan *overload*, maka sangat dibutuhkan adanya tindakan perluasan lahan agar dapat menampung sampah masyarakat dalam jangka panjang serta tidak memicu timbulnya permasalahan baru sebagai akibat semakin sempitnya lahan yang ada.

4. Penelitian ini sangat diperlukan untuk penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, dan variabel karakteristik agen pelaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tachjan (2006) *Implementasi Kebijakan Publik*. Edited by D. dan C. P. Mariana. Bandung.

### Jurnal

- Prassojo C, Istirokhatun T, dan O. W. (2014) 'Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus', *Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro*.
- Wachid, A. and Caesar, D. L. (2020) 'Kabupaten Kudus Policy Implementation of Waste Management', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), pp. 173–183.

### Internet

- Mustofa, A. (2019) *Kali Bacin Diduga Tercemar Limbah Industri, Ini Respon Pemkab*. <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/01/15/113850/kali-bacin-diduga-tercemar-limbah-industri-ini-respon-pemkab> diakses pada 30 Mei 2020 pukul 13.01 WIB
- Sasongko, A. (2019) *Buang Sampah Sembarang, Sembilan Warga Kudus Kena Denda*. <https://www.republika.co.id/berita/pn77sx313/buang-sampah->

[sembarang-sembilan-warga-kudus-kena-denda](#) diakses pada 30 Mei 2020 pukul 13.07 WIB

<http://sipsn.menlhk.go.id/?q=node/57179>  
diakses pada 16 Oktober 2019 pukul 02.57 WIB.

<https://infodesanews.com/tpa-kudus-cemari-lingkungan/> diakses pada 10 Mei 2020 pukul 14.31 WIB